

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DI DESA SAYANG SEDAYU KECAMATAN TELUK KERAMAT
KABUPATEN SAMBAS**

Nurul Hadiansyah

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : nurul_hadiansyah@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan masyarakat di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Judul skripsi diangkat berdasarkan permasalahan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sayang Sedayu yang masih belum maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah Deskriptif. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Subjek Penelitian adalah Anggota BPD Sayang Sedayu, Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sayang Sedayu, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan LPMD. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah rendahnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sayang Sedayu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, rekomendasinya adalah diharapkan kepada BPD Sayang Sedayu untuk lebih meningkatkan sosialisasi, komunikasi dan interaksi kepada masyarakat Desa Sayang Sedayu sehingga diharapkan mampu menyerap/menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan koordinasi diantara anggota BPD sehingga mampu bekerja secara efektif dan lebih baik, Ketua BPD harus lebih inisiatif dalam meningkatkan motivasi anggota dan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas diharapkan mampu memperhatikan BPD khususnya dapat memberikan pelatihan kepada anggota BPD yang ada di Kabupaten Sambas sehingga anggota BPD terlatih dan nantinya mampu untuk menjalankan tugas dan fungsi secara baik dan benar.

Kata kunci: Kinerja, BPD, tugas dan fungsi.

Abstract

This study aims to describe and analyze the performance Village Consultative Body carrying out its duties and functions in the Development of village communities in the Sayang Sedayu Village Teluk Keramat sub district Sambas regency. Title of thesis performance issues raised by the Village Consultative Body Sayang Sedayu that is not yet maximal. This study used a qualitative approach, and type of research is descriptive. As for the data collection technique that uses observation, interviews, and documentation. Then for data analysis using data reduction, data display, and conclusion. Research sites in the village of Sayang Sedayu Teluk Keramat sub district Sambas regency. The research subject is Sayang Sedayu BPD members, village chiefs and their village device Sayang Sedayu, community leaders, religious leaders, youth leaders and LPMD. The conclusion of this study is the low performance of the Village Consultative Body Sayang Sedayu in performing its duties and functions. Therefore, the recommendation is expected to BPD Unfortunately Sayang Sedayu to further improve socialization, communication and interaction to the villagers so Sayang Sedayu expected to absorb / accommodate the aspirations of the people, improve coordination among the members of the BPD so that they can work effectively and better, Chairman of BPD should be initiatives in order to increase the motivation of members and government Sambas regency is expected to pay attention to BPD in particular can provide training to members of the BPD's in Sambas regency that BPD members trained and will be able to execute the duties and functions properly.

Keywords: Performance, BPD, duties and functions.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan suatu terobosan baru bagi masyarakat karena dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri.

Salah satu perwujudan dari Otonomi Daerah tersebut yaitu Pemerintahan Desa, yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, desa memiliki hak dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa tentu tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa, tetapi juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan tolok ukur utama dalam melihat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena desa adalah ujung tombak dari pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan karena desa merupakan instansi yang bersentuhan atau berhadapan langsung dengan masyarakat. Kemudian mekanisme tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada kerjasama

antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa dan juga untuk menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan kontribusi dan mampu menampung berbagai harapan, keinginan, serta aspirasi masyarakat, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi. Dengan dibentuknya BPD diharapkan mampu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi dari munculnya undang – undang tersebut dijabarkan kembali tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa, maka diatur kembali dalam Peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa, dimana peraturan tersebut merupakan perwujudan dari peraturan yang mengatur tentang Desa sebelumnya.

Sehubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka dalam hal ini tentu memiliki kaitan yang sangat erat dalam proses pembangunan di desa. Perlu diketahui pula bahwa segala bentuk pembangunan yang ada di desa adalah di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk pembangunan tersebut harus berdasarkan kepada aspirasi atau keinginan masyarakat, dalam hal ini BPD harus berusaha lebih keras

lagi untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan tersebut di butuhkan partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaannya, karena tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.

Terdapat berbagai fakta mengenai BPD antara lain yaitu dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, dimana diketahui bahwa fungsi dari BPD sendiri yaitu membahas atau menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Jika melihat fungsi tersebut maka dapat diketahui bahwa BPD yang ada di Desa Sayang Sedayu belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. Hal itu di buktikan dengan jumlah Peraturan yang dibuat BPD sampai Saat ini hanya ada 1 (satu) peraturan saja yaitu Tata Tertib BPD.

Kemudian jika dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat BPD juga masih belum memperlihatkan kinerja yang maksimal hal ini terlihat dari banyaknya harapan masyarakat yang menginginkan jalan desa yang baik ternyata masih belum bisa terealisasi. Namun demikian hal itu tentu bukan sepenuhnya tanggung jawab BPD dan pemerintah desa melainkan juga tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah daerah.

Selanjutnya berdasarkan isu-isu yang berkembang dimasyarakat, BPD masih dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal tersebut dikuatkan dengan jarangny BPD melakukan pertemuan atau rapat langsung dengan masyarakat baik di tingkat dusun maupun di tingkat desa. BPD juga dirasakan masih jauh dari harapan sehingga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya langsung

kepada perangkat desa dan bukan melalui BPD yang ada di Desa Sayang Sedayu.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan antara lain yaitu “ Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas ?”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan masyarakat di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas serta apa saja yang menghambat kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya ?

4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman tentang tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa serta mampu memahami teori – teori tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu wadah penyalur aspirasi masyarakat desa serta pengawas dalam pembangunan desa. Kemudian penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Teori

a. Konsep Kinerja

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil

seperti yang di harapkan Joko widodo (2005 :78). Berikutnya menurut Prawirosentono (dalam Widodo 2005:78) Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi , Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Dari defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, pada hakikatnya kinerja adalah berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan a a yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Bernardin & Russell 1998, (dalam Umam 2009 : 186) Kinerja adalah catatan mengenai akibat – akibat yang di hasilkan pada sebuah fu gsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu yang berhubungan dengan tujuan orgaanisasi. Jadi kinerja seseorang merupakan gabungan dari kemapuan, usaha, dan kesempatan yang dapat di ukur dari akibat yang dihasilkan. Itu semualah yang menjadi rangkaian untuk terbentuknya suatu kinerja seseorang dalam suatu organisasi.

Kemudian kinerja juga dapat di bedakan menjadi 2 yaitu terdiri dari kinerja individu dan juga kinerja organisasi. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang di gerakkan atau di jalankan oleh sekelompok orang

yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut (joko widodo 2005 : 79). Dengan demikian, kinerja lembaga (organisasi) salah satunya di tentukan oleh kinerja sekelompok orang sebagai pelaku organisasi, sebaliknya kinerja sekelompok orang sebagai pelaku organisasi di tentukan oleh struktur, peralatan dan keuangan yang dimiliki oleh orgnisasi.

b. Konsep Penilaian Kinerja

Pengukuran dan manfaat penilaian kinerja dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada adalah akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus (berkelanjutan). Menurut Bernardin dan Russel (1993 : 379), (dalam Umam 2009 : 190) “ *A way of measuring the contribution of individuals to their organization.*” Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu pada organisasi tempat mereka bekerja. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja yaitu merupakan suatu proses menilai atau mengukur pencapaian seseorang atau prestasi seseorang atas suatu hal yang dikerjakannya dan memberikan kontribusi bagi instansi tempat mereka bekerja.

Selanjutnya menurut Dharma (dalam Heriadi 2011:28) untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dapat di lihat dari :

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus dikerjakan.
2. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan.

3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dari beberapa indikator diatas dapat disimpulkan bahwa suatu hasil kerja dapat dilihat dari berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan, berapa bagus kualitas kerja yang dihasilkan dan tingkat ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut.

Menurut Moehariono (2012:162) ada tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yaitu :

1. Responsivitas (*responsiveness*), yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 2. Responsibilitas (*responsibility*), yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit.
 3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.
2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Subjek dalam penelitian ini adalah semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sayang Sedayu, Kepala Desa Sayang Sedayu beserta perangkatnya, Ketua LPMD, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Tokoh Pemuda. Selanjutnya, yang menjadi objek penelitian adalah Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sayang Sedayu. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan melakukan diskusi dan konsultasi dengan pembimbing.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Responsivitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Responsivitas merupakan suatu gambaran atau menggambarkan suatu kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya yang tidak lain adalah mampu memenuhi atau mencapai apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data atau informasi yang didapat penulis dilapangan, BPD Sayang Sedayu masih belum mampu atau belum memiliki responsivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seharusnya BPD sebagai lembaga desa yang memiliki fungsi legislasi mampu untuk membuat produk hukum, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sampai saat ini BPD Sayang Sedayu baru membuat 1 produk hukum yaitu Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib

Badan Permusyawaratan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian untuk fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat BPD juga masih belum maksimal hal tersebut di buktikan dengan banyaknya harapan masyarakat yang seharusnya di sampaikan melalui BPD malahan di sampaikan langsung kepada perangkat desa. Padahal yang seharusnya adalah melalui BPD terlebih dahulu baru disampaikan dalam rapat bersama Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Kemudian untuk salah satu tugas BPD yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, PD juga terkesan belum mampu dan masih belum maksimal dalam melaksanakannya.

2. Responsibilitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Responsibilitas sendiri yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit. Dalam hal responsibilitas BPD Sayang Sedayu masih dinilai kurang. Karena untuk pengelolaan administrasi BPD baik itu dari segi pembukuan dan lain sebagainya tidak teratur dan sampai saat ini masih banyak data yang hilang dan belum di bukukan. Melihat dari fakta tersebut jelas bahwa BPD Sayang Sedayu masih belum memiliki responsibilitas dalam berorganisasi padahal tertib administrasi merupakan cermin apakah organisasi tersebut berhasil atau mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian juga anggota BPD Sayang Sedayu juga masih belum memahami apa sebenarnya

tugas dan fungsi mereka sehingga berdampak pada anggota BPD yang kurang aktif dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah tercantum dalam peraturan yang mereka buat sendiri. Hal tersebut sebetulnya tidak boleh terjadi karena akan berdampak pada kinerja anggota BPD itu sendiri.

3. Akuntabilitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Akuntabilitas sangat di tuntutan dalam sebuah organisasi. Akuntabilitas merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat, Moehariono (2012:162). Jadi akuntabilitas itu lebih kepada bagaimana pertanggung jawaban organisasi dalam menjalankan tugas yang di emban, dan untuk mengetahui apakah organisasi tersebut memiliki akuntabilitas yang baik maka hal itu hanya bisa dilihat dari bagaimana penilaian masyarakat mengenai organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sayang Sedayu, BPD Sayang Sedayu masih memiliki akuntabilitas yang tergolong rendah dan hal tersebut terlihat dari banyaknya tugas dan fungsi yang belum mampu dijalankan mereka. Jadi BPD sayang sedayu belum mampu mengemban tugas yang telah di tetapkannya sendiri dalam Tata Tertib BPD Sayang Sedayu Nomor 1 Tahun 2010. Hal tersebut dibuktikan dengan jarang nya BPD mengadakan rapat baik rapat intern maupun rapat bersama berbagai elemen masyarakat. sehingga wajar saja apabila ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa BPD tidur. Didalam tata tertib tersebut telah di atur mulai dari kedudukan, tupoksi,

wewenang, hak, kewajiban, larangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur BPD.

Kemudian kurangnya akuntabilitas BPD ini secara otomatis berdampak juga kepada pandangan masyarakat bahwa kinerja BPD selama ini masih rendah. Masyarakat menilai Kinerja BPD dengan melihat dari bagaimana anggota BPD mampu bergaul atau berinteraksi dengan masyarakat. Kebanyakan anggota BPD masih belum mampu untuk bergaul dengan masyarakat, bergaul dalam arti bersedia mendengarkan keluhan dan saran dari masyarakat. Selama ini yang terjadi di lapangan adalah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan dan sarannya langsung kepada kepala desa dan perangkat desa lainnya tanpa melalui BPD terlebih dahulu. Kemudian masyarakat juga mengatakan bahwa sampai saat ini sosialisasi BPD sendiri mengenai kedudukan tupoksi dan lain sebagainya masih kurang kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak tidak mengetahui apa sebenarnya tugas dan fungsi BPD.

Namun demikian dengan rendahnya tingkat akuntabilitas BPD tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya yang antara lain yaitu kurangnya fasilitas penunjang kerja BPD. Salah satu penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD adalah mengenai fasilitas. Fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung bagi terselenggaranya kegiatan atau proses dalam suatu organisasi, baik fasilitas kerja seperti ruangan, meja, kursi dan komputer serta alat-alat lainnya. Dengan adanya fasilitas tersebut suatu

organisasi akan mampu melaksanakan berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan tersebut bisa berupa hal yang bersifat administratif maupun forum rapat dan sebagainya. Untuk BPD sendiri sebagai lembaga musyawarah tentunya sangat membutuhkan fasilitas seperti ruangan kelengkapan lainnya seperti kursi dan meja. Namun kenyataan di lapangan yang penulis lihat atau observasi untuk fasilitas tersebut tidak ada bahkan sampai saat ini untuk ruangan BPD masih menumpang di Kantor Desa Sayang Sedayu

4. Hambatan BPD Desa Sayang Sedayu Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang diukur dari Responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dimana yang menjadi penghambat kurangnya kinerja BPD Sayang Sedayu antara lain yaitu :

1. Kurangnya fasilitas yang dimiliki BPD Sayang Sedayu.

Fasilitas merupakan salah satu penunjang organisasi dalam menjalankan tugasnya. Seperti halnya BPD Sayang Sedayu yang sampai saat ini masih belum memiliki fasilitas sama sekali. Fakta yang penulis temukan di lapangan berdasarkan observasi yaitu BPD Sayang Sedayu hanya memiliki 1 (satu) meja kerja saja dan itu hanya di letakkan di rumah ketua BPD. Kemudian untuk fasilitas lainnya seperti ruangan masih menumpang

di kantor desa, selanjutnya seperti komputer juga masih belum ada.

Selama ini BPD hanya menggunakan fasilitas pribadi mereka guna menunjang kerja organisasi. Kurangnya fasilitas berdampak kepada banyaknya pekerjaan BPD yang tertunda seperti pembuat SPJ dan kegiatan administrasi lainnya.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi BPD.

Kebanyakan masyarakat di Desa Sayang Sedayu tidak atau belum memahami tugas dan fungsi dari BPD, meskipun ada yang faham atau tau tapi masih sedikit dibanding yang belum tahu. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang dalam hal menyampaikan aspirasi dan keluhannya langsung kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.

3. Kurangnya Pelatihan untuk Anggota BPD.

Pelatihan merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan anggota BPD sehingga mampu meningkatkan kinerja kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja BPD Sayang Sedayu, mulai dari periode mereka menjabat yaitu tahun 2009 sampai saat ini masih belum pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk anggota BPD. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah daerah yang

dalam hal ini khususnya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan kemampuan anggota BPD dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayah pedesaan.

4. Kurangnya koordinasi antara ketua BPD dengan Anggota.

Koordinasi sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, tanpa koordinasi maka tidak akan mungkin semua pekerjaan akan terlaksana dengan baik. Fakta menarik yang penulis temukan pada tubuh BPD Sayang Sedayu adalah kurangnya koordinasi antara ketua dengan anggota dan hal tersebut dinyatakan sendiri oleh anggota BPD Sayang Sedayu yang menyatakan bahwa ketua BPD kurang inisiatif untuk menggerakkan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga sampai saat ini anggota terlihat vakum dan tidak bergerak.

D. Simpulan dan Keterbatasan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Responsivitas BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih rendah. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kemampuan BPD Sayang Sedayu dalam proses pembuatan produk hukum yang ada di Desa Sayang Sedayu. Kemudian kurangnya daya tanggap BPD Sayang sedayu dalam menyerap aspirasi masyarakat sehingga masyarakat sering langsung menyampaikan aspirasinya kepada

Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa melalui BPD yang ada di Desa Sayang Sedayu. Kemudian BPD Sayang Sedayu belum mampu melakukan tugasnya sebagai pengawas dari Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang ada di Desa Sayang Sedayu.

2. Responsivitas BPD Sayang Sedayu masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD tidak bisa melaksanakannya sesuai dengan peraturan BPD No 1 tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang merupakan Penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 tahun 2009 tentang Desa.
3. Akuntabilitas BPD Sayang Sedayu masih tergolong rendah. Hal tersebut dinilai masih belum mampu mengemban tugasnya sebagai anggota BPD yang tentunya memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Adapun tugas dan fungsi yang harus mereka jalankan antara lain yaitu membuat suatu produk hukum yang mana sampai saat ini baru satu produk hukum yang dibuat yaitu Peraturan BPD Nomor 1 tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Sayang Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Kemudian juga sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, dalam hal ini BPD masih belum mampu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat, hal tersebut terlihat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPD sehingga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tidak melalui BPD tetapi langsung kepada Perangkat Desa Sayang Sedayu.

4. Kinerja BPD Sayang Sedayu tergolong rendah di karenakan terdapat hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hambatan tersebut antara lain yaitu menyangkut fasilitas seperti belum adanya ruangan khusus Sekretariat BPD di Desa Sayang Sedayu, Tidak adanya Pelatihan khusus untuk BPD dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, lemahnya koordiansi antara ketua dan anggota BPD Sayang Sedayu dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi BPD sehingga bisa dikatakan BPD kurang bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat Desa Sayang Sedayu.

2. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut:

1. Karena penelitian didesa maka yang menjadi hambatan dalam penelitian adalah mengenai data-data yang masih minim sehingga perlu usaha yang gigih untuk mendapatkannya.
2. Penulis merupakan peneliti pemula sehingga hasil penelitian kurang maksimal terutama dalam mengolah data dan melakukan wawancara sehingga kedepannya diharapkan ada penelitian yang dapat menyempurnakan penelitian ini.

E. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran, seluruh pengasuh, Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintahan Desa Sayang Sedayu, Badan Permusyawaratan Desa Sayang Sedayu serta seluruh masyarakat Desa Sayang Sedayu yang terlibat dalam penelitian ini.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi, Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Sugiono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

..... 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

..... 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Tohardi,A. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung ; Mandar : aju.

Umam, Khaerul. 2009. *Perilaku Organisasi*. Bandung : Pustaka Setia.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia.

Widodo, joko. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : B yu Media.3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Heriadi, Andry. 2011. *Kinerja Petugas Operator Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Camat Pontianak Timur Kota Pontianak*.(Skripsi), Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama.

Moehariono. 2012. *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta :Erlangga.

Satori dan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan / Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Desa

Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2012

Kecamatan Teluk Keramat Dalam Angka Tahun 2012

Monografi Desa Sayang Sedayu Tahun 2012

Profil dan Potensi Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Dalam Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif oleh Wahana Visi Indonesia ADP Sambas Tahun 2010.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NURUL HADIANSYAH
NIM / Periode lulus : E42009006 / 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : nurul.hadiansyh@yahoo.com / 085751758561

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DI DESA SAYANG SEDAYU KECAMATAN TELUK KERAMAT
KABUPATEN SAMBAS**

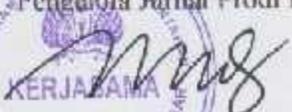
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

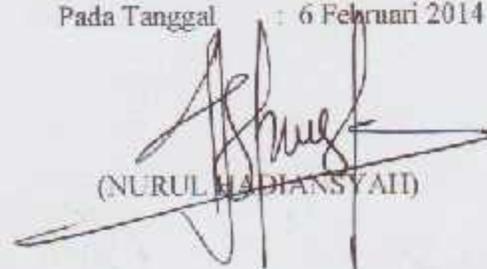
untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Prodi IP

Di: H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 6 Februari 2014


(NURUL HADIANSYAH)